

OMBUDSMAN BERIKAN MASUKAN KE GUGUS TUGAS

Kamis, 30 April 2020 - Korinna Al Emira

JAMBI - Satuan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jambi mendapat masukan dari Ombudsman Perwakilan Jambi dalam menghadapi dan mengatasi dampak pandemi. Masukan untuk segera melakukan penambahan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas serta bantuan sosial bagi masyarakat terdampak disampaikan dalam Rapat Rutin Satgas Covid-19 kemarin (29/04) di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

"Ombudsman sebagai pengawas eksternal dan penyambung masyarakat dalam memperoleh pelayanan, memberikan masukan yaitu segera lakukan penambahan APD, dan memberikan bansos bagi masyarakat terdampak," ucap Jafar Ahmad, Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi. Khusus bantuan sosial untuk masyarakat, Ombudsman juga mendorong pemerintah juga memperhatikan mahasiswa, disabilitas dan narapidana yang memperoleh asimilasi untuk mendapat bantuan.

Mahasiswa, disabilitas dan narapidana yang memperoleh asimilasi secara langsung juga ikut terdampak Covid-19 untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mahasiswa asal Jambi maupun mahasiswa dari luar daerah yang belajar di Jambi banyak yang tidak bisa pulang ke daerah dan terdampak penerapan zona merah atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keluhan tersebut sudah masuk ke Ombudsman dan diteruskan ke Dinas Sosial.

"Sesuai paparan dari masing-masing koordinator, penambahan Alat Pelindung Diri sangat penting dilakukan segera. Kami Ombudsman sudah memberikan masukan sejak dua minggu lalu agar Pemprov segera melakukan penambahan baik melalui pengadaan sendiri maupun bantuan pusat," tambah Jafar.

Dari paparan masing-masing koordinator, diketahui APD di gudang logistik sudah banyak berkurang, mengingat bertambahnya paparan Virus Covid-19 di Provinsi Jambi. Sementara untuk pengadaan APD, Ismail Fahmi dari Kejaksaan Tinggi Jambi menyatakan harus segera dilakukan dan pihaknya bisa ikut mendampingi.

Dalmanto, Koordinator dari Dinas Sosial mengakui untuk Bansos memang segera dibahas. Terkait persoalan mahasiswa, disabilitas, serta narapidana asimilasi agar mendapat perhatian. Pembahasan dilakukan segera karena anggaran penanggulangan bencana tersedia dan bisa digunakan. Untuk itu perlu pendataan mahasiswa, disabilitas dan narapidana asimilasi.